

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.02/Menhut-II/2010

**TENTANG
SISTEM INFORMASI KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Sistem Informasi Kehutanan disusun secara berjenjang yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Sistem Informasi Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), yang telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan sistem Informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Prosedur...

2. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomatis.
5. Data digital adalah data yang telah diubah dalam bentuk atau format yang dapat dibaca oleh perangkat elektronik.
6. Data spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
7. Data numerik adalah data yang merupakan atribut dari data spasial atau data lain yang tidak terkait dengan aspek keruangan.
8. Basis data adalah Koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau terkait satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat.
9. Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data kehutanan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya secara digital.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
11. Rancangan Umum Sistem Informasi Kehutanan adalah Rancangan sistem informasi kehutanan yang bersifat makro dan menyeluruh dan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan sistem informasi kehutanan yang lebih detail.
12. Perangkat keras adalah perangkat fisik komputer beserta kelengkapannya.
13. Perangkat lunak adalah program yang berfungsi untuk mengendalikan kerja komputer dalam memproses data.
14. Perangkat lunak tidak berlisensi / bersifat terbuka (open source software) adalah perangkat lunak yang dikembangkan dengan source code yang terbuka.
15. Aplikasi Khusus adalah perangkat lunak (program komputer) yang dikembangkan untuk kepentingan internal dan disesuaikan dengan sistem yang telah ada.
16. Monitoring adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian penyelenggaraan sistem informasi kehutanan.
17. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap penyelenggaraan sistem informasi kehutanan.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah Unit pengelolaan hutan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
19. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan sistem informasi kehutanan adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan di tingkat nasional serta sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Tujuan penetapan sistem informasi kehutanan adalah terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kehutanan secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan pelayanan bagi publik dan dunia usaha di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota serta unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan.

BAB II RUANG LINGKUP SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Informasi Kehutanan meliputi :

- a. Jenis data kehutanan, Prosedur Pengelolaan Data Kehutanan serta Informasi Kehutanan.
- b. Dukungan Sumberdaya Manusia dan Teknologi Informasi.
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kehutanan pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

BAB III DATA KEHUTANAN

Bagian Kesatu Jenis Data Kehutanan yang diperlukan

Pasal 4

Jenis data kehutanan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan meliputi data:

- a. Kawasan dan potensi hutan;
- b. Industri kehutanan;
- c. Perdagangan hasil hutan;
- d. Rehabilitasi lahan kritis;
- e. Pemberdayaan masyarakat; dan
- f. Tata kelola kehutanan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua Data Kawasan dan Potensi Hutan

Pasal 5

Data kawasan dan potensi Hutan antara lain meliputi :

- a. Luas kawasan hutan dan perairan;
- b. Tata batas kawasan hutan;
- c. Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan;
- d. Luas dan letak perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
- e. Luas dan letak kesatuan pengelolaan hutan;
- f. Potensi hasil hutan kayu;
- g. Potensi hasil hutan bukan kayu;
- h. Luas areal yang tertutup dan tidak tertutup hutan;
- i. Luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan;
- j. Jenis flora dan fauna yang dilindungi;
- k. Gangguan keamanan hutan;
- l. Lokasi dan luas areal kebakaran hutan; dan
- m. Perlindungan hutan.

Bagian Ketiga Data Industri Kehutanan

Pasal 6

Data industri kehutanan antara lain meliputi :

- a. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
- b. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- c. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
- d. Jumlah ijin pengusahaan tumbuhan dan satwa liar;
- e. Produksi kayu bulat dan kayu olahan;
- a. Produksi hasil hutan bukan kayu;
- b. Pelaksanaan sistem silvikultur intensif;
- f. Jumlah dan kapasitas industri primer kehutanan; dan
- g. Sertifikasi pengelolaan hutan.

Bagian Keempat Data Perdagangan Hasil Hutan

Pasal 7

Data perdagangan hasil hutan antara lain meliputi :

- a. Volume dan nilai ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- b. Volume dan nilai impor kayu bulat dan kayu olahan;
- c. Nilai perdagangan tumbuhan dan satwa liar;
- d. Potensi penyerapan dan perdagangan karbon;
- e. Nilai PNBP dari penggunaan kawasan hutan; dan
- f. Kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Data Rehabilitasi Lahan Kritis

Pasal 8

Data rehabilitasi lahan kritis antara lain meliputi :

- a. Lokasi dan luas lahan kritis berdasarkan DAS;
- b. Laju deforestasi dan degradasi;
- c. Hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- d. Luas dan lokasi kegiatan reklamasi kawasan hutan; dan
- e. Pengembangan kegiatan perbenihan.

Bagian Keenam
Data Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

Data pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi :

- a. Lokasi dan luas hutan desa;
- b. Jumlah, letak dan luas areal hutan tanaman rakyat;
- c. Letak dan luas areal hutan rakyat;
- d. Letak dan luas areal hutan kemasyarakatan;
- e. Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM);
- f. Pembangunan masyarakat desa hutan (PMDH);
- g. Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; dan
- h. Peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi.

Bagian Ketujuh
Data Tata kelola Kehutanan

Pasal 10

Data tata kelola kehutanan antara lain meliputi:

- a. Jumlah dan sebaran PNS instansi kehutanan;
- b. Alokasi dan realisasi anggaran;
- c. Sarana dan prasarana instansi kehutanan;
- d. Realisasi audit reguler dan khusus;
- e. Penyuluhan kehutanan; dan
- f. Teknologi produk dan informasi ilmiah.

Bagian Kedelapan
Sifat, tipe, format dan skala

Pasal 11

- (1) Data dan informasi kehutanan bersifat lengkap, akurat dan terkini.
- (2) Tipe data dan informasi kehutanan terdiri dari data spasial dan data numerik.
- (3) Format data dan informasi kehutanan terdiri dari data digital dan non digital.
- (4) Data spasial tingkat nasional berskala minimal 1 : 250.000, tingkat provinsi berskala minimal 1 : 100.000 serta tingkat kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan berskala minimal 1 : 50.000.

BAB IV...

BAB IV PROSEDUR PENGELOLAAN DATA KEHUTANAN

Pasal 12

- (1) Organisasi Pengelola basis data dan informasi kehutanan terdiri dari : instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengurus kehutanan serta kesatuan pengelolaan hutan.
- (2) Pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi dan mencakup : pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan/pemeliharaan, pemutakhiran dan penyajian.
- (3) Pengumpulan data dilaksanakan melalui kegiatan : survey, penelitian, dokumen administrasi kehutanan, pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Proses pengolahan dan analisis data dilakukan secara digital dan/atau manual sesuai ketersediaan data, kemajuan teknologi serta kebutuhan informasi.
- (5) Penyimpanan/pemeliharaan data pada media elektronik (digital) dan/atau tercetak.
- (6) Pemutakhiran data dilakukan setiap ada data baru.
- (7) Penyajian data dilakukan melalui media elektronik dan/atau cetak.
- (8) Pengguna data dan informasi kehutanan meliputi : instansi pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga legislatif dan yudikatif, dunia usaha serta masyarakat luas.
- (9) Format penyediaan data adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV peraturan ini.

BAB V INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 13

- (1) Jenis informasi kehutanan diperoleh dari pengolahan dan analisis data kehutanan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Jenis Informasi kehutanan antara lain meliputi : Potensi dan Kondisi sumberdaya hutan, Hasil-hasil pencapaian target pembangunan kehutanan serta Informasi lain sesuai kebutuhan.

BAB VI DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu Sumberdaya Manusia

Pasal 14

Pengelolaan sistem informasi kehutanan dilaksanakan oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang memadai.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi Kehutanan harus memiliki standar kompetensi antara lain: analis sistem, pembuat program, pengelola basis data, pengelola jaringan, ahli keamanan sistem dan operator.
- (2) Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi.

Bagian Kedua Teknologi Informasi

Pasal 16

- (1) Teknologi Informasi terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras dan infrastruktur jaringan komputer.
- (2) Teknologi informasi dikelola untuk mendukung pengelolaan data dan informasi kehutanan secara efisien dan efektif.
- (3) Pengelolaan teknologi informasi meliputi :
 - a. Identifikasi kebutuhan.
 - b. Pengadaan Sistem operasi dan aplikasi umum berlisensi atau bersifat terbuka, aplikasi khusus serta perangkat keras yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lain,
 - c. Pemeliharaan terhadap gangguan perangkat lunak serta kerusakan perangkat keras dan jaringan komputer.
 - d. Pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.
 - e. Pembuatan dokumentasi pengelolaan.

BAB VII PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 17

Penyelenggaraan sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Tingkat nasional;
- b. Tingkat provinsi;
- c. Tingkat kabupaten/kota; dan
- d. Tingkat unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

Pasal 18

Penyelenggaraan sistem informasi kehutanan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan umum (grand design) pada tingkat nasional dan rancangan teknis pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan;
- b. Pengembangan basis data (spasial dan numerik) kehutanan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia di bidang sistem informasi kehutanan sesuai kebutuhan dan kemajuan teknologi informasi;
- d. Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras serta infrastruktur jaringan komputer;
- e. Penentuan transparansi data dan informasi kehutanan;
- f. Pengaturan...

- f. Pengaturan prosedur untuk peningkatan pelayanan bagi instansi pemerintah, publik dan dunia usaha secara nasional yang dilaksanakan secara digital;
- g. Pengaturan pengintegrasian tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan;
- h. Pengaturan tata waktu penyampaian data/informasi sebagai berikut :
 - 1) Kepala kesatuan pengelolaan hutan menyampaikan data/informasi kepada kepala instansi kehutanan tingkat kabupaten/kota paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
 - 2) Kepala instansi kehutanan kabupaten/kota menyampaikan data/informasi kepada kepala instansi kehutanan provinsi paling lambat bulan April tahun berikutnya.
 - 3) Kepala instansi kehutanan provinsi menyampaikan data/informasi kepada menteri kehutanan paling lambat bulan Mei tahun berikutnya.
 - 4) Menteri kehutanan menyusun data/informasi kehutanan tingkat nasional paling lambat bulan Juli tahun berikutnya.
- i. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang; dan
- j. Pengaturan alokasi anggaran pada tiap tingkatan.

Pasal 19

Penyelenggara sistem informasi kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Menteri menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat nasional.
- b. Gubernur menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat provinsi.
- c. Bupati/Walikota menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat kabupaten/kota.
- d. Kepala unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH) menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2010
**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.
SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

No. P.02/Menhut-II/2010, tanggal 5 Januari 2010

Tentang

SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

LAMPIRAN I. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Sampai Dengan Tahun . . .

No.	Provinsi	Luas Kawasan Hutan Dan Perairan (Ha)																		Keterangan
		Taman Nasional			Taman Wisata Alam			Taman Buru	Cagar Alam			Suaka Margasatwa			Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Jumlah Luas Kawasan Hutan Dan Perairan	
		Daratan	Perairan/ Laut	Jumlah	Daratan	Perairan/ Laut	Jumlah		Daratan	Perairan/ Laut	Jumlah	Daratan	Perairan/ Laut	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapan Sampai Dengan Tahun . . .

No.	Provinsi	Jumlah lokasi/ Kelompok Hutan	Total Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . .

No	Provinsi	Tukar Menukar Kawasan Hutan			Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)		
			Tanah Keluar (TK)	Tanah Masuk (TM)	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun . . .

No	Provinsi	Fungsi Awal (Ha)			Fungsi Akhir (Ha)				Keterangan
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah									

Tabel 6. Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pertanian/Perkebunan dan Transmigrasi Berdasarkan SK Pelepasan Sampai Dengan Tahun . . .

No	Provinsi	Perubahan Peruntukan				Keterangan
		Pertanian/Perkebunan		Transmigrasi		
		Jumlah Unit	Luas Areal (Ha)	Jumlah Unit	Luas Areal (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7

Tabel 8. Potensi Hasil Hutan Kayu Tahun . . .

No	Provinsi	Potensi Kayu (diameter $\geq$ 20 cm)		Keterangan
		Semua Jenis (m3/Ha)	Jenis Perdagangan (m3/Ha)	
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 9. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

No	Provinsi	Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu				Keterangan
		Rotan (Kg/Ha)	Damar (Kg/Ha)	Getah (Kg/Ha)	Lainnya (Kg/Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Tabel 10. Luas Penutupan Lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM Tahun . . .

No	Provinsi	Kawasan Hutan (1.000 Ha)							APL (1.000 Ha)	Jumlah (1.000 Ha) (9+10)	Keterangan
		Hutan Tetap					HPK	Jumlah (7+8)			
		KSA+KPA+TB	HL	HPT	HP	Jumlah (3+4+5+6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nama Provinsi										
	A. Hutan										
	B. Non Hutan										
	C. Data tidak lengkap										
2	dst . . .										
	Jumlah										
	A. Hutan										
	B. Non Hutan										
	C. Data tidak lengkap										

Tabel 11. Luas dan Letak Areal Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . .

No.	Provinsi	Jenis Penggunaan						Keterangan
		Pertambangan		Non Pertambangan		Jumlah		
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 12. Jenis Flora Dan Fauna Yang Dilindungi Tahun . . . Sampai Dengan Tahun . . .

No.	Tahun	Populasi																			Keterangan
		Kelas Satwa Yang Dilindungi										Kelas Tumbuhan Yang Dilindungi									
		Mamalia	Aves	Reptilia	Pisces	Insecta	Molusca	Crustacea	Anthozoa	Bivalvia	Palmae	Rafflesia	Orchidaceae	Nephentaceae	Dipterocarpaceae	Araceae	Parasite Plant	Apocynaceae	Cykas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Jumlah																				

Tabel 13. Gangguan Keamanan Hutan Tahun . . .

No.	Provinsi	Kerusakan Hutan									Keterangan
		Perambahan Pemukiman Liar			Perladangan Liar			Penebangan Liar/Pencurian Hasil Hutan			
		Luas Area (Ha)	KK	Orang	Luas Area (Ha)	KK	Orang	Batang/ Tunggak	Kayu Bulat/ Olahan	Satwa (ekor/lembar)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

Tabel 14: Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan Tahun . . .

No.	Provinsi	Lokasi Dan Luas Kebakaran Hutan (Ha)											Jumlah (Ha)	Keterangan
		TN	TWA	TB	THR	SA	CA	HL	HPT	HP	HPK	Hutan Kota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Aceh													
2	Sumatera Utara													
3	Sumatera Barat													
4	Riau													
5	Kep. Riau													
6	Dst.....													
33	Papua Barat													
	JUMLAH													

Tabel 16. Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun . . .

No.	Provinsi	SK Definitif		SK Sementara		SK Pencadangan		Total		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah										

Tabel 17. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

No.	Provinsi	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 18: Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Wisata Alam Tahun . . .

No.	Provinsi	Jenis I U P J L W A												Keterangan
		Pemanfaatan Jasa Aliran Air		Pemanfaatan Air		Wisata Alam		Perlindungan Keanekaragaman Hayati		Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan		Penyerapan Karbon		
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Aceh													
2	Sumatera Utara													
3	R I a u													
4	Kep. Riau													
5	Sumatera Barat													
6	dst . . .													
33	Papua Barat													
	Jumlah													

Tabel 19. Jumlah Ijin Pengusahaan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . .

No.	Provinsi	Jumlah Perusahaan Penangkar		Keterangan
		Tumbuhan & Satwa Liar Yang Dilindungi	Tumbuhan & Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi	
1	2	3	4	5
I. TUMBUHAN				
Jumlah				
II. SATWA				
Jumlah				

Tabel 20. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . .

No.	Kelas Tumbuhan dan Satwa / Provinsi	Satuan	Jumlah Diperdagangkan	Jumlah Surat Angkut Tumbuhan/Satwa	Nilai Hasil Perdagangan (ribuan rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I. TUMBUHAN						
1	ANGGREK	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
2	GAHARU	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
3	PAKIS	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
4	LAINNYA					
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
Jumlah A (Tumbuhan)						
II. SATWA						
1	MAMMALIA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
2	AMPHIBI	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
3	PRIMATA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
4	BURUNG	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
5	IKAN	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
6	LAINNYA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
Jumlah B (Satwa)						
Jumlah Total (A+B)						

Tabel 21. Produksi Kayu Bulat Tahun . . .

No.	Provinsi	Produksi Kayu Bulat																	Keterangan
		IUPHHK Hutan Alam (m3)	IUPHHK Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Yang Telah Mencapai Keseimbangan (m3)	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri atau HTI (m3)	Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman HTI (m3)	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Rakyat atau HTR (m3)	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi atau HTHR (m3)	Perum Perhutani (m3)	IUPHHK Dalam Hutan Desa (m3)	IUPHHK Dalam Hutan Kemasyarakatan (m3)	Izin Lainnya Yang Sah (ILS) Atau IPK (m3)	Hutan Rakyat (m3)	Kayu Perkebunan (m3)	Impor Kayu Bulat (m3)	Hasil Lelang (m3)	Pemilik atau Pedagang Hasil Hutan Kayu Bulat Dan Asal Usul Yang Sah (m3)	IUPHHK Lain (m3)	Jumlah (m3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah																		

Tabel 22. Produksi Kayu Olahan Tahun . . .

No	Provinsi	Produksi Containaeer Flooring (m3)	Produksi Doorskin Plywood (m3)	Produksi Fancy Playwood (m3)	Produksi Film Face Plywood (m3)	Produksi Polyester Plywood (m3)	Produksi Block Board (m3)	Produksi Fancy Block Board (m3)	Produksi Polyester Block Board (m3)	Produksi Lumber Core (m3)	Produksi Bare Core (m3)	Produksi Moulding (m3)	Produksi Wood Working (m3)	Produksi S4S (m3)	Produksi Kusen Pintu Jendela (m3)	Produksi Laminating Board (m3)	Produksi Finger Joint Laminating (m3)	Produksi Mebel (m3)	Produksi Flooring / Parquet Flooring (m3)	Produksi Partickel Board (m3)	Produksi MDF (m3)	Produksi Produk Lainnya (m3)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Jumlah																						

Tabel 23. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

No.	Provinsi	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu																		Keterangan
		Sirlak,Getah dan Damar		Bahan Penyamak		Terpentin		Resin Spiritus Oil		Ter Kayu		Barang Anyaman dari Rotan		Rotan Setengah Jadi		Arang Kayu		Briket Arang		
		Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah																			

Tabel 24. Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif Tahun . . .

No.	Provinsi	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 25. Jumlah dan Kapasitas Industri Primer Kehutanan Tahun . . .

No.	Provinsi	Non Integrasi										Integrasi		Keterangan
		Veneer		Plywood		LVL		Sawn Timber		Wood Chips		Sawn Timber+Veneer		
		Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah														

Tabel 26. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tahun . . .

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	KPH	Nama Unit Manajemen (FMU)	Luas Area (Ha)	Sertifikat (Voluntary/Mandatory)	Lembaga Sertifikasi	Masa Berlaku	Peringkat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah									

Tabel 27. Volume dan Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu Tahun . . .

No.	Negara Tujuan	Kayu Bulat		Kayu Gergajian		Kayu Lapis		Pulp		Veneer Sheet		Particle Board		Fibreboard		Keterangan
		Vol (m3)	Nilai (xRp.1000)	Vol (m3)	Nilai (xRp.1000)	Vol (m3)	Nilai (xRp.1000)	Vol (ton)	Nilai (xRp.1000)	Vol (m3)	Nilai (xRp.1000)	Vol (m3)	Nilai (xRp.1000)	Vol (m3)	Nilai (xRp.1000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah																

Tabel 28. Volume Dan Nilai Ekspor Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

[illegible]

Tabel 29. Volume dan Nilai Impor Kayu Bulat dan Kayu Olahan Tahun . . .

No.	Negara Asal	Kayu Bulat		Kayu Olahan																			
				Produksi Containaer Flooring		Produksi Doorskin Plywood		Produksi Fancy Playwood		Produksi Film Face Plywood		Produksi Polyester Plywood		Produksi Block Board		Produksi Fancy Block Board		Produksi Polyester Block Board		Produksi Lumber Core		Produksi Bare Core	
		Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Jumlah																						

No.	Negara Asal	Kayu Olahan																				Keterangan
		Produksi Moulding		Produksi Wood Working		Produksi S4S		Produksi Kusen Pintu / Jendela		Produksi Laminating Board		Produksi Finger Joint Laminating		Produksi Mebel		Produksi Flooring / Parquet Flooring		Produksi Partickel Board		Produksi MDF		
		Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
																		</				

Tabel 30. Potensi Penyerapan Dan Perdagangan Karbon Dari Kawasan Hutan Tahun . . .

No.	Provinsi	Luas Kawasan Hutan Yang Telah Diidentifikasi (Ha)				Potensi Penyerapan Karbon (ton CO2)	Potensi Perdagangan Karbon (xRp.1000)	Keterangan
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 31. Nilai PNBP Dari Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . .

No.	Provinsi	Jenis Penggunaan Kawasan Hutan	Nilai PNBP (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 32. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Tahun . . .

No.	Tahun Harga Dasar Konstan Digunakan	Produk Domestik Bruto (PDB)		Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDB (%)	Keterangan
		Kehutanan (xRp.1000)	Total PDB (xRp.1000)		
1	2	3	4	5	6
1	1993				
2	1998				
3	2000				
4	. . .				
	Jumlah				

Tabel 33. Lokasi dan Luas Lahan Kritis Tahun . . .

No.	Provinsi	DAS	Dalam dan Luar Kawasan			Tingkat ke kritisian				Keterangan
			Dalam kawasan (Ha)	Luar Kawasan (Ha)	Jumlah (Ha)	Sangat kritis (Ha)	kritis (Ha)	Agak kritis (Ha)	Jumlah (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah										

Tabel 34. Perhitungan Deforestasi Periode Tahun . . .

No	Provinsi	Deforestasi Kawasan Hutan Tetap (Ha/Tahun)					HPK	Jumlah (7+8)	APL	Jumlah Total (9+10)	Keterangan
		KSA+KPA+TB	HL	HPT	HP	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

Tabel 35. Hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun . . .

[illegible]

Tabel 36. Luas dan Lokasi Kegiatan Reklamasi Kawasan Hutan Tahun . . .

No.	Provinsi	Luas Kawasan Hutan Yang Direklamasi (Ha)				Jumlah (Ha)	Keterangan
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 37. Luas Areal Sumber Benih Dan Potensi Tahun . . .

No.	Provinsi	Luas Areal Sumber Benih (Ha)	Potensi (ton)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 38. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun . . .

No.	Provinsi	Jumlah Unit	Luas Kawasan (Ha)			Pemanfaatan Hutan Desa								Jumlah (8+10+12+14)	Keterangan
						IUPHHK-HA		IUPHHK-HT		IUPHHBK		IUPJL			
			HL	HP	Jumlah	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah															

Tabel 39. Letak dan Luas Hutan Tanaman Rakyat Tahun . . .

No.	Provinsi	Luas Areal Yang Dicadangkan (Ha)	UNIT HTR			Keterangan
			Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Tabel 40. Letak dan Luas Hutan Rakyat Tahun . . .

No.	Provinsi	Luas Hutan Rakyat (Ha)	Keterangan
1	2	3	4
Jumlah			

Tabel 41. Letak Dan Luas Areal Hutan Kemasyarakatan Tahun . . .

No.	Provinsi	Kegiatan Hutan Kemasyarakatan			Keterangan
		Penanaman (Ha)	Pelatihan Petugas Lapangan (orang)	Pelatihan Petani (orang)	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 42. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tahun . . .

No.	Provinsi	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)	Jumlah KK Yang Terlibat (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 43. Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun . . .

No.	Provinsi	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)	Jumlah Desa Lokasi Kegiatan PMDH (unit)	Jumlah KK Yang Terlibat (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
						Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 44. Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Tahun . . .

No.	Provinsi	Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit)	Jumlah KK Yang Dilibatkan (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 46. Jumlah dan Sebaran PNS Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun . . .

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan														Jumlah		Keterangan
		S3		S2		S1/D4		D3		SLTA		SLTP		SD				
		L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pusat																	
1	Kantor Pusat																	
2	UPT																	
Jumlah I																		
II	Provinsi																	
1	Dinas Kehutanan																	
2	UPTD																	
Jumlah II																		
Jumlah I + II																		
III	BUMN																	
IV	BUMD																	
Jumlah I + II + III																		

Tabel 45. Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi Tahun . . .

No.	Provinsi	Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit)	Jumlah KK Yang Dilibatkan (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 47. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Pusat dan Daerah Tahun . . .

No.	Unit Kerja	Tahun		dst . . .	Keterangan
		Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
A. Pusat					
1	Kantor Pusat				
2	UPT				
B. Provinsi/Daerah					
	Jumlah				

Tabel 48. Sarana dan Prasarana Instansi Kehutanan Pusat Dan Daerah Tahun . . .

No.	Pusat Dan Provinsi	Kelompok Sarana Dan Prasarana							Keterangan
		Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan Dan Jembatan	Irigasi	Instalasi Dan Jaringan Air/ Gas/ Listrik/ Telepon	Aset Tetap Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Departemen Kehutanan									
B. Provinsi/Daerah									
	Jumlah								

Tabel 49. Rencana Dan Realisasi Audit Reguler Dan Khusus Tahun . . .

No	Tahun	Jenis Audit				Keterangan
		Reguler		Khusus		
		Rencana (kali)	Realisasi (kali)	Rencana (kali)	Realisasi (kali)	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Tabel 50. Jumlah Penyuluh Kehutanan (PK) Dan Kelompok Tani Hutan Tahun . . .

No.	Povinsi	Tenaga Penyuluh Kehutanan (orang)						Kelompok Tani Hutan										Keterangan
		Terampil	Ahli	Calon PK Terampil	Calon PK Ahli	Honorer	Jumlah	Pemula		Madya		Lanjut		Utama		Jumlah		
								Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (orang)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Tabel 51. Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Tahun . . .

No.	Program/Judul UKP	Jumlah Kegiatan Penelitian	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

Tabel 52. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Badan Litbang Kehutanan Tahun . . .

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Dasar Hukum KHDTK (Ha)	Unit Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 53. Hasil Penemuan Baliitbang Kehutanan Yang Sudah Dan Akan Diusulkan Untuk Mendapatkan HKI Tahun . . .

No.	Jenis Temuan/Karya Tulis	Perlindungan HKI		Keterangan
		Hak Paten	Hak Cipta	
1	2	3	4	5
Jumlah				

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Sampai Dengan Tahun . . .

Provinsi :

[illegible]

Tabel 2. Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . .

Provinsi :

No	Kabupaten/Kota	Tata Batas (Km)			Keterangan
		Batas Luar	Batas Fungsi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan Sampai Dengan Tahun . . .
Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi/ Kelompok Hutan	Total Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . .

Provinsi :

No	Kabupaten/Kota	Tukar Menukar Kawasan Hutan			Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)		
			Tanah Keluar (TK)	Tanah Masuk (TM)	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun . . .
Provinsi :

No	Kabupaten/Kota	Fungsi Awal (Ha)			Fungsi Akhir (Ha)				Keterangan
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah									

Tabel 6. Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pertanian/Perkebunan dan Transmigrasi Berdasarkan SK Pelepasan Sampai Dengan Tahun . . .

Provinsi :

No	Kabupaten/Kota	Perubahan Peruntukan				Keterangan
		Pertanian/Perkebunan		Transmigrasi		
		Jumlah Unit	Luas Areal (Ha)	Jumlah Unit	Luas Areal (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

**Tabel 7. Luas dan Letak Kesatuan Pengelolaan Hutan Sampai Dengan Tahun . . .
Provinsi :**

[illegible]

Tabel 8. Potensi Hasil Hutan Kayu Tahun . . .

Provinsi :

No	Kabupaten/Kota	Potensi Kayu (diameter $\geq$ 20 cm)		Keterangan
		Semua Jenis (m ³ /Ha)	Jenis Perdagangan (m ³ /Ha)	
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 9. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

Provinsi :

No	Kabupaten/Kota	Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu				Keterangan
		Rotan (Kg/Ha)	Damar (Kg/Ha)	Getah (Kg/Ha)	Lainnya (Kg/Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Tabel 10. Luas Penutupan Lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM Tahun . . .
Provinsi :

No	Kabupaten/Kota	Kawasan Hutan (1.000 Ha)							APL (1.000 Ha)	Jumlah (1.000 Ha) (9+10)	Keterangan
		Hutan Tetap					HPK	Jumlah (7+8)			
		KSA+KPA+TB	HL	HPT	HP	Jumlah (3+4+5+6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nama Kabupaten										
	A. Hutan										
	B. Non Hutan										
	C. Data tidak lengkap										
2	dst . . .										
	Jumlah										
	A. Hutan										
	B. Non Hutan										
	C. Data tidak lengkap										

Tabel 11. Luas dan Letak Areal Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Penggunaan						Keterangan
		Pertambangan		Non Pertambangan		Jumlah		
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Provinsi :

[illegible]

Tabel 13: Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan Tahun . . .
Provinsi :

[illegible]

Tabel 14. Hasil Operasi Pengamanan Hutan Tahun . . .
Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Unit Kerja Pelaksana	Temuan			Sitaan			Keterangan
			Kayu Olahan (m3)	Kayu Bulat (btg/phn/tgk/m3)	Lain-lain	Kayu Olahan (m3)	Kayu Bulat (btg/phn/tgk/m3)	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah									

Tabel 15. Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	SK Definitif		SK Sementara		SK Pencadangan		Total		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah										

Tabel 16. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Provinsi :

Jumlah	
--------	--

Tabel 18. Jumlah Ijin Pengusahaan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Penangkar		Keterangan
		Tumbuhan & Satwa Liar Yang Dilindungi	Tumbuhan & Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi	
1	2	3	4	5
I. TUMBUHAN				
Jumlah				
II. SATWA				
Jumlah				

Tabel 19. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kelas Tumbuhan dan Satwa / Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah Diperdagangkan	Jumlah Surat Angkut Tumbuhan/Satwa	Nilai Hasil Perdagangan (ribuan rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I. TUMBUHAN						
1	ANGGREK	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
2	GAHARU	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
3	PAKIS	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
4	LAINNYA					
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
Jumlah A (Tumbuhan)						
II. SATWA						
1	MAMMALIA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
2	AMPHIBI	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
3	PRIMATA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
4	BURUNG	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
5	IKAN	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
6	LAINNYA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
Jumlah B (Satwa)						
Jumlah Total (A+B)						

Tabel 20. Produksi Kayu Bulat Tahun . . .
Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Produksi Kayu Bulat																	Keterangan
		IUPHHK Hutan Alam	IUPHHK Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Yang Telah Mencapai Keseimbangan	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri atau HTI	Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman HTI	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Rakyat atau HTR	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi atau HTHR	Perum Perhutani	IUPHHK Dalam Hutan Desa	IUPHHK Dalam Hutan Kemasyarakatan	Izin Lainnya Yang Sah (ILS) Atau IPK	Hutan Rakyat	Kayu Perkebunan	Impor Kayu Bulat	Hasil Lelang	Pemilik atau Pedagang Hasil Hutan Kayu Bulat Dan Asal Usul Yang Sah	IUPHHK Lain	Jumlah	
1	2	(m3) 3	(m3) 4	(m3) 5	(m3) 6	(m3) 7	(m3) 8	(m3) 9	(m3) 10	(m3) 11	(m3) 12	(m3) 13	(m3) 14	(m3) 15	(m3) 16	(m3) 17	(m3) 18	(m3) 19	20
Jumlah																			

Tabel 21. Produksi Kayu Olahan Tahun . . .
Provinsi :

[illegible]

Tabel 22. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu																		Keterangan
		Sirlak,Getah dan Damar		Bahan Penyamak		Terpentin		Resin Spiritus Oil		Ter Kayu		Barang Anyaman dari Rotan		Rotan Setengah Jadi		Arang Kayu		Briket Arang		
		Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah																			

Tabel 23. Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 24. Jumlah dan Kapasitas Industri Primer Kehutanan Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Non Integrasi										Integrasi		Keterangan
		Veneer		Plywood		LVL		Sawn Timber		Wood Chips		Sawn Timber+Veneer		
		Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah													

Tabel 25. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tahun . . .

Provinsi :

No.	<u>Kabupaten/Kota</u> K P H	Nama Unit Manajemen (FMU)	Luas Area (Ha)	Sertifikat (Voluntary/Mandatory)	Lembaga Sertifikasi	Masa Berlaku	Peringkat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 26. Potensi Penyerapan Dan Perdagangan Karbon Dari Kawasan Hutan Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan Yang Telah Diidentifikasi (Ha)				Potensi Penyerapan Karbon (ton CO2)	Potensi Perdagangan Karbon (xRp.1000)	Keterangan
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah							

Tabel 27. Nilai PNBP Dari Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Penggunaan Kawasan Hutan	Nilai PNBP (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 28. Lokasi dan Luas Lahan Kritis Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Dalam dan Luar Kawasan			Tingkat ke kritisian				Keterangan
			Dalam kawasan (Ha)	Luar Kawasan (Ha)	Jumlah (Ha)	Sangat kritis (Ha)	kritis (Ha)	Agak kritis (Ha)	Jumlah (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah										

Tabel 29. Perhitungan Deforestasi Periode Tahun . . .

Provinsi :

No	Kabupaten/Kota	Deforestasi Kawasan Hutan Tetap (Ha/Tahun)					HPK	Jumlah (7+8)	APL	Jumlah Total (9+10)	Keterangan
		KSA+KPA+TB	HL	HPT	HP	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

Tabel 30. Hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Lahan		Reboisasi (Ha)	Penanaman Hutan Rakyat (Ha)	Kebun Bibit (Ha)	Unit Percontohan		DAM Pengendali (Unit)	Gully Plug (Unit)	Sumur Resapan (Unit)	Rehab Teras (Ha)	Keterangan
		Dalam Kawasan (Ha)	Luar Kawasan (Ha)				UPSA (Unit)	UPM (Unit)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah													

Tabel 31. Luas dan Lokasi Kegiatan Reklamasi Kawasan Hutan Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan Yang Direklamasi (Ha)				Jumlah (Ha)	Keterangan
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 32. Luas Areal Sumber Benih Dan Potensi Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Luas Areal Sumber Benih (Ha)	Potensi (ton)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 33. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun . . .
Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Luas Kawasan (Ha)			Pemanfaatan Hutan Desa								Jumlah (8+10+12+14)	Keterangan
						IUPHHK-HA		IUPHHK-HT		IUPHHBK		IUPJL			
			HL	HP	Jumlah	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah															

Tabel 34. Letak dan Luas Hutan Tanaman Rakyat Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Luas Areal Yang Dicadangkan (Ha)	Unit HTR			Keterangan
			Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Tabel 35. Letak dan Luas Hutan Rakyat Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Luas Hutan Rakyat (Ha)	Keterangan
1	2	3	4
Jumlah			

Tabel 36. Letak Dan Luas Areal Hutan Kemasyarakatan Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Kegiatan Hutan Kemasyarakatan			Keterangan
		Penanaman (Ha)	Pelatihan Petugas Lapangan (orang)	Pelatihan Petani (orang)	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 37. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)	Jumlah KK Yang Terlibat (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 38. Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)	Jumlah Desa Lokasi Kegiatan PMDH (unit)	Jumlah KK Yang Terlibat (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
						Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 39. Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit)	Jumlah KK Yang Dilibatkan (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 40. Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit)	Jumlah KK Yang Dilibatkan (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 41. Jumlah dan Sebaran PNS Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun . . .

Provinsi :

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan														Jumlah		Keterangan
		S3		S2		S1/D4		D3		SLTA		SLTP		SD				
		L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	
I	Provinsi																	
1	Dinas Provinsi																	
2	UPTD Provinsi																	
Jumlah I																		
II	Kabupaten																	
1	...																	
2	dst																	
Jumlah II																		
Jumlah I + II																		

Tabel 42. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Tahun . . .

Provinsi : . . .

No.	Unit Kerja	Tahun		dst . . .	Keterangan
		Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
A. Kehutanan Provinsi					
1	Dinas Provinsi				
2	UPT Dinas				
B. Kehutanan Kab/Kota					
1					
2	dst . . .				
	Jumlah				

Tabel 43. Sarana dan Prasarana Instansi Kehutanan Pusat Dan Daerah Tahun . . .

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Kelompok Sarana Dan Prasarana							Keterangan
		Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan Dan Jembatan	Irigasi	Instalasi Dan Jaringan Air/ Gas/ Listrik/ Telepon	Aset Tetap Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Instansi Provinsi									
B. Instansi Kabupaten/Kota									
	Jumlah								

Provinsi :

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

44

LAMPIRAN III. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

[illegible]

Tabel 2. Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	KPH	Tata Batas (Km)			Keterangan
		Batas Luar	Batas Fungsi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan Sampai Dengan Tahun . . .
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	KPH	Jumlah lokasi/ Kelompok Hutan	Total Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . .
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	KPH	Tukar Menukar Kawasan Hutan			Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)		
			Tanah Keluar (TK)	Tanah Masuk (TM)	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	KPH	Fungsi Awal (Ha)			Fungsi Akhir (Ha)				Keterangan
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah									

Tabel 6. Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pertanian/Perkebunan dan Transmigrasi Berdasarkan SK Pelepasan Sampai Dengan Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	KPH	Perubahan Peruntukan				Keterangan
		Pertanian/Perkebunan		Transmigrasi		
		Jumlah Unit	Luas Areal (Ha)	Jumlah Unit	Luas Areal (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Tabel 7. Luas dan Letak Kesatuan Pengelolaan Hutan Sampai Dengan Tahun . . .
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	KPH	Tahun										Jumlah		Keterangan
		2009		2010		...		...		...		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Tabel 8. Potensi Hasil Hutan Kayu Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	KPH	Potensi Kayu (diameter $\geq$ 20 cm)		Keterangan
		Semua Jenis (m ³ /Ha)	Jenis Perdagangan (m ³ /Ha)	
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 9. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	KPH	Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu				Keterangan
		Rotan (Kg/Ha)	Damar (Kg/Ha)	Getah (Kg/Ha)	Lainnya (Kg/Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Tabel 10. Luas Penutupan Lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	KPH	Kawasan Hutan (1.000 Ha)							APL (1.000 Ha)	Jumlah (1.000 Ha) (9+10)	Keterangan
		Hutan Tetap					HPK	Jumlah (7+8)			
		KSA+KPA+TB	HL	HPT	HP	Jumlah (3+4+5+6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KPH . . .										
	A. Hutan										
	B. Non Hutan										
	C. Data tidak lengkap										
2	dst										
Jumlah											
	A. Hutan										
	B. Non Hutan										
	C. Data tidak lengkap										

Tabel 11. Luas dan Letak Areal Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	Jenis Penggunaan						Keterangan
		Pertambangan		Non Pertambangan		Jumlah		
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tabel 12. Gangguan Keamanan Hutan tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	Kerusakan Hutan									Keterangan
		Perambahan Pemukiman Liar			Perladangan Liar			Penebangan Liar/Pencurian Hasil Hutan			
		Luas Area (Ha)	KK	Orang	Luas Area (Ha)	KK	Orang	Batang/ Tunggak	Kayu Bulat/ Olahan	Satwa (ekor/lembar)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

[illegible]

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	KPH	Temuan			Sitaan			Keterangan
		Kayu Olahan (m3)	Kayu Bulat (btg/phn/tgk/m3)	Lain-lain	Kayu Olahan (m3)	Kayu Bulat (btg/phn/tgk/m3)	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 15. Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	SK Definitif		SK Sementara		SK Pencadangan		Total		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah										

Tabel 16. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

[illegible]

Tabel 18. Jumlah Ijin Pengusahaan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Jumlah Perusahaan Penangkar		Keterangan
	Tumbuhan & Satwa Liar Yang Dilindungi	Tumbuhan & Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi	
1	2	3	4
I. TUMBUHAN			
	Jumlah		
II. SATWA			
	Jumlah		

Tabel 19. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Kelas Tumbuhan dan Satwa / Nama Perusahaan	Satuan	Jumlah Diperdagangkan	Jumlah Surat Angkut Tumbuhan/Satwa	Nilai Hasil Perdagangan (ribuan rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I. TUMBUHAN						
1	ANGGREK	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
2	GAHARU	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
3	PAKIS	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
4	LAINNYA					
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
Jumlah A (Tumbuhan)						
II. SATWA						
1	MAMMALIA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
2	AMPHIBI	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
3	PRIMATA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
4	BURUNG	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
5	IKAN	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
6	LAINNYA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
Jumlah B (Satwa)						
Jumlah Total (A+B)						

Tabel 20. Produksi Kayu Bulat Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	Produksi Kayu Bulat																	Keterangan
		IUPHHK Hutan Alam	IUPHHK Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Yang Telah Mencapai Keseimbangan	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri atau HTI	Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman HTI	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Rakyat atau HTR	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi atau HTHR	Perum Perhutani	IUPHHK Dalam Hutan Desa	IUPHHK Dalam Hutan Kemasyarakatan	Izin Lainnya Yang Sah (ILS) Atau IPK	Hutan Rakyat	Kayu Perkebunan	Impor Kayu Bulat	Hasil Lelang	Pemilik atau Pedagang Hasil Hutan Kayu Bulat Dan Asal Usul Yang Sah	IUPHHK Lain	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Jumlah																			

Tabel 21. Produksi Kayu Olahan Tahun . . .

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	KPH	Produksi Contaenaer Flooring (m3)	Produksi Doorskin Plywood (m3)	Produksi Fancy Playwood (m3)	Produksi Film Face Plywood (m3)	Produksi Polyester Plywood (m3)	Produksi Block Board (m3)	Produksi Fancy Block Board (m3)	Produksi Polyester Block Board (m3)	Produksi Lumber Core (m3)	Produksi Bare Core (m3)	Produksi Moulding (m3)	Produksi Wood Working (m3)	Produksi S4S (m3)	Produksi Kusen Pintu / Jendela (m3)	Produksi Laminating Board (m3)	Produksi Finger Joint Laminating (m3)	Produksi Mebel (m3)	Produksi Flooring / Parquet Flooring (m3)	Produksi Partickel Board (m3)	Produksi MDF (m3)	Produksi Produk Lainnya (m3)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Jumlah																						

Tabel 22. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu																		Keterangan
		Sirlak,Getah dan Damar		Bahan Penyamak		Terpentin		Resin Spiritus Oil		Ter Kayu		Barang Anyaman dari Rotan		Rotan Setengah Jadi		Arang Kayu		Briket Arang		
		Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Jumlah																				

Tabel 23. Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif Tahun . . .

Kabupaten/Kota:

Provinsi :

No.	KPH	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 24. Jumlah dan Kapasitas Industri Primer Kehutanan Tahun . . .

Kabupaten/Kota:

Provinsi :

No.	KPH	Non Integrasi										Integrasi		Keterangan
		Veneer		Plywood		LVL		Sawn Timber		Wood Chips		Sawn Timber+Veneer		
		Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah														

Tabel 25. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tahun . . .

Kabupaten/Kota:

Provinsi :

No.	K P H	Luas Area (Ha)	Sertifikat (Voluntary/Mandatory)	Lembaga Sertifikasi	Masa Berlaku	Peringkat	Keterangan
	Nama Unit Manajemen (FMU)						
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 26. Potensi Penyerapan Dan Perdagangan Karbon Dari Kawasan Hutan Tahun . . .

Kabupaten/Kota:

Provinsi :

No.	KPH	Luas Kawasan Hutan Yang Telah Diidentifikasi (Ha)				Potensi Penyerapan Karbon (ton CO2)	Potensi Perdagangan Karbon (xRp.1000)	Keterangan
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 27. Nilai PNBP Dari Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . .

Kabupaten/Kota:

Provinsi :

No.	Nama Perusahaan Penyetor	Jenis Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah PNBP Yang Disetorkan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 28. Lokasi dan Luas Lahan Kritis Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	DAS	Dalam dan Luar Kawasan			Tingkat ke kritisian				Keterangan
			Dalam kawasan (Ha)	Luar Kawasan (Ha)	Jumlah (Ha)	Sangat kritis (Ha)	kritis (Ha)	Agak kritis (Ha)	Jumlah (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah										

Tabel 29. Perhitungan Deforestasi Periode Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	KPH	Deforestasi Kawasan Hutan Tetap (Ha/Tahun)					HPK	Jumlah (7+8)	APL	Jumlah Total (9+10)	Keterangan
		KSA+KPA+TB	HL	HPT	HP	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

[illegible]

Tabel 31. Luas dan Lokasi Kegiatan Reklamasi Kawasan Hutan Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	PERUSAHAAN	Luas Kawasan Hutan Yang Direklamasi (Ha)				Jumlah (Ha)	Keterangan
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 32. Luas Areal Sumber Benih Dan Potensi Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	Luas Areal Sumber Benih (Ha)	Potensi (ton)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 33. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	Jumlah Unit	Luas Kawasan (Ha)			Pemanfaatan Hutan Desa								Jumlah (8+10+12+14)	Keterangan
						IUPHHK-HA		IUPHHK-HT		IUPHHBK		IUPJL			
			HL	HP	Jumlah	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah															

Tabel 34. Letak dan Luas Hutan Tanaman Rakyat Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	Luas Areal Yang Dicadangkan (Ha)	PERIJINAN PEMANFAATAN HTR			Keterangan
			Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					

Tabel 35. Letak dan Luas Hutan Rakyat Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	Luas Hutan Rakyat (Ha)	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

Tabel 36. Letak Dan Luas Areal Hutan Kemasyarakatan Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	Kegiatan Hutan Kemasyarakatan			Keterangan
		Penanaman (Ha)	Pelatihan Petugas Lapangan (orang)	Pelatihan Petani (orang)	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 37. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)	Jumlah KK Yang Terlibat (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
				Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Tabel 38. Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)	Jumlah Desa Lokasi Kegiatan PMDH (unit)	Jumlah KK Yang Terlibat (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 39. Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Tahun. . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit)	Jumlah KK Yang Dilibatkan (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 40. Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit)	Jumlah KK Yang Dilibatkan (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 41. Jumlah dan Sebaran PNS Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan														Jumlah		Keterangan
		S3		S2		S1/D4		D3		SLTA		SLTP		SD				
		L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	
I	Dinas Kab/Kota																	
1	UPTD Kab/Kota																	
2	BUMD Kab/Kota																	
	Jumlah I																	

Tabel 42. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Unit Kerja	Tahun		dst . . .	Keterangan
		Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

Tabel 43. Sarana dan Prasarana Instansi Kehutanan Pusat Dan Daerah Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Unit Kerja	Kelompok Sarana Dan Prasarana							Keterangan
		Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan Dan Jembatan	Irigasi	Instalasi Dan Jaringan Air/ Gas/ Listrik/ Telepon	Aset Tetap Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah									

Tabel 44. Jumlah Penyuluh Kehutanan (PK) Dan Kelompok Tani Hutan Tahun . . .

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	KPH	Tenaga Penyuluh Kehutanan (orang)						Kelompok Tani Hutan										Keterangan	
		Terampil	Ahli	Calon PK Terampil	Calon PK Ahli	Honorar	Jumlah	Pemula		Madya		Lanjut		Utama		Jumlah			
								Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (orang)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Jumlah																			

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT UNIT PENGELOLA/ KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

1

Tabel 2. Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Realisasi Tata Batas (Km)			Keterangan
		Batas Luar	Batas Fungsi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan Sampai Dengan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Total Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4
Jumlah			

Tabel 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Tukar Menukar Kawasan Hutan			Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)		
			Tanah Keluar (TK)	Tanah Masuk (TM)	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Fungsi Awal (Ha)			Fungsi Akhir (Ha)				Keterangan
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah									

Tabel 6. Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pertanian/Perkebunan dan Transmigrasi Berdasarkan SK Pelepasan Sampai Dengan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Perubahan Peruntukan				Keterangan
		Pertanian/Perkebunan		Transmigrasi		
		Jumlah Unit	Luas Areal (Ha)	Jumlah Unit	Luas Areal (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

[illegible]

Tabel 8. Potensi Hasil Hutan Kayu Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Potensi Kayu (diameter $\geq$ 20 cm)		Keterangan
		Semua Jenis (m3/Ha)	Jenis Perdagangan (m3/Ha)	
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 9. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu				Keterangan
		Rotan (Kg/Ha)	Damar (Kg/Ha)	Getah (Kg/Ha)	Lainnya (Kg/Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Tabel 10. Luas Penutupan Lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Kawasan Hutan (1.000 Ha)							APL (1.000 Ha)	Jumlah (1.000 Ha) (9+10)	Keterangan
		Hutan Tetap					HPK	Jumlah (7+8)			
		KSA+KPA+TB	HL	HPT	HP	Jumlah (3+4+5+6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kelompok Hutan . . .										
	A. Hutan										
	B. Non Hutan										
	C. Data Tidak Lengkap										
2	dst . . .										
Jumlah											

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Jenis Penggunaan						Keterangan
		Pertambahan		Non Pertambahan		Jumlah		
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 12. Gangguan Keamanan Hutan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Kerusakan Hutan									Keterangan
		Perambahan Pemukiman Liar			Perladangan Liar			Penebangan Liar/Pencurian Hasil Hutan			
		Luas Area (Ha)	KK	Orang	Luas Area (Ha)	KK	Orang	Batang/ Tunggak	Kayu Bulat/ Olahan	Satwa (ekor/lembar)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

Tabel 13. Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Lokasi Dan Luas Kebakaran Hutan (Ha)											Jumlah (Ha)	Keterangan
		Taman Nasional	Taman Wisata Alam	Taman Buru	Taman Hutan Rakyat	Suaka Alam	Cagar Alam	Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Hutan Kota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah														

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Temuan			Sitaan			Keterangan
		Kayu Olahan (m3)	Kayu Bulat (btg/phn/tgk/m3)	Lain-lain	Kayu Olahan (m3)	Kayu Bulat (btg/phn/tgk/m3)	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 15. Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Nama Pemegang Ijin	SK Definitif		SK Sementara		SK Pencadangan		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 16. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Nama Pemegang Ijin	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4
Jumlah			

Tabel 17: Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Wisata Alam Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

[illegible]

Tabel 18. Jumlah Ijin Pengusahaan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Jumlah Perusahaan Penangkar		Keterangan
	Tumbuhan & Satwa Liar Yang Dilindungi	Tumbuhan & Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi	
1	2	3	4
I. TUMBUHAN			
	Jumlah		
II. SATWA			
	Jumlah		

Tabel 19. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . .

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Kelas Tumbuhan Dan Satwa / Nama Perusahaan	Satuan	Jumlah Diperdagangkan	Jumlah Surat Angkut Tumbuhan/Satwa	Nilai Hasil Perdagangan (ribuan rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I. TUMBUHAN						
1	ANGGREK	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
2	GAHARU	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
3	PAKIS	batang				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
4	LAINNYA					
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
Jumlah A (Tumbuhan)						
II. SATWA						
1	MAMMALIA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
2	AMPHIBI	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
3	PRIMATA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
4	BURUNG	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
5	IKAN	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
6	LAINNYA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst . . .					
Jumlah B (Satwa)						
Jumlah Total (A+B)						

Tabel 20. Produksi Kayu Bulat Tahun . . .

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Tahun	Produksi Kayu Bulat																Keterangan
		IUPHHK Hutan Alam (m3)	IUPHHK Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Yang Telah Mencapai Keseimbangan (m3)	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri atau HTI (m3)	Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman HTI (m3)	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Rakyat atau HTR (m3)	IUPHHK Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi atau HTHR (m3)	IUPHHK Dalam Hutan Desa (m3)	IUPHHK Dalam Hutan Kemasyarakatan (m3)	Izin Lainnya Yang Sah (ILS) Atau IPK (m3)	Hutan Rakyat (m3)	Kayu Perkebunan (m3)	Impor Kayu Bulat (m3)	Hasil Lelang (m3)	Pemilik atau Pedagang Hasil Hutan Kayu Bulat Dan Asal Usul Yang Sah (m3)	IUPHHK Lain (m3)	Jumlah (m3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah																	

Tabel 21. Produksi Kayu Olahan Tahun . . .

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Tahun	Produksi Containaeer Flooring (m3)	Produksi Doorskin Plywood (m3)	Produksi Fancy Playwood (m3)	Produksi Film Face Plywood (m3)	Produksi Polyester Plywood (m3)	Produksi Block Board (m3)	Produksi Fancy Block Board (m3)	Produksi Polyester Block Board (m3)	Produksi Lumber Core (m3)	Produksi Bare Core (m3)	Produksi Moulding (m3)	Produksi Wood Working (m3)	Produksi S4S (m3)	Produksi Kusen Pintu / Jendela (m3)	Produks i Laminati ng (m3)	Produksi Finger Joint Laminating (m3)	Produksi Mebel (m3)	Produksi Flooring / Parquet Flooring (m3)	Produksi Partickel Board (m3)	Produksi MDF (m3)	Produksi Produk Lainnya (m3)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Jumlah																						

Tabel 22. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Tahun	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu																		Keterangan
		Sirlak,Getah dan Damar		Bahan Penyamak		Terpentin		Resin Spiritus Oil		Ter Kayu		Barang Anyaman dari Rotan		Rotan Setengah Jadi		Arang Kayu		Briket Arang		
		Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Jumlah																				

Tabel 23. Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota:

Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Pemegang IUPHHK	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 24. Jumlah dan Kapasitas Industri Primer Kehutanan Tahun . . .

KPH :
Kabupaten/Kota:
Provinsi :

No.	Tahun	Non Integrasi										Integrasi		Keterangan
		Veneer		Plywood		LVL		Sawn Timber		Wood Chips		Sawn Timber+Veneer		
		Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah														

Tabel 25. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota:

Provinsi :

No.	Nama Unit Manajemen (FMU)	Luas Area (Ha)	Sertifikat (Voluntary/Mandatory)	Lembaga Sertifikasi	Masa Berlaku	Peringkat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 26. Potensi Penyerapan Dan Perdagangan Karbon Dari Kawasan Hutan Tahun . . .

KPH :
Kabupaten/Kota:
Provinsi :

No.	KPH	Luas Kawasan Hutan Yang Telah Diidentifikasi (Ha)				Potensi Penyerapan Karbon (ton CO2)	Potensi Perdagangan Karbon (xRp.1000)	Keterangan
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 27: Nilai PNBP Dari Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota:

Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Nama Perusahaan Penyetor	Jenis Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah PNBP Yang Disetorkan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 28. Lokasi dan Luas Lahan Kritis Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	DAS	Luas (Ha)	Tingkat ke kritisian				Keterangan
				Sangat kritis (Ha)	kritis (Ha)	Agak kritis (Ha)	Jumlah (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 29. Perhitungan Deforestasi Periode Tahun . . .

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Deforestasi Kawasan Hutan Tetap (Ha/Tahun)					Keterangan
		KSA+KPA+TB	HL	HPT	HP	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 30. Hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Rehabilitasi Lahan Dalam Kawasan (Ha)	Reboisasi (Ha)	Penanaman Hutan Rakyat (Ha)	Kebun Bibit (Ha)	Unit Percontohan		DAM Pengendali (Unit)	Gully Plug (Unit)	Sumur Resapan (Unit)	Rehab Teras (Ha)	Keterangan
						UPSA (Unit)	UPM (Unit)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jumlah												

Tabel 31. Luas dan Lokasi Kegiatan Reklamasi Kawasan Hutan Tahun . . .

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Perusahaan	Luas Kawasan Hutan Yang Direklamasi (Ha)				Jumlah (Ha)	Keterangan
			Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 32. Luas Areal Sumber Benih Dan Potensi Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Luas Areal Sumber Benih (Ha)	Potensi (ton)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 33. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Nama Hutan Desa	Luas Kawasan (Ha)			Pemanfaatan Hutan Desa								Jumlah (8+10+12+14)	Keterangan
					IUPHHK-HA		IUPHHK-HT		IUPHHBK		IUPJL			
		HL	HP	Jumlah	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah														

Tabel 34 Letak dan Luas Hutan Tanaman Rakyat Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Luas Areal Yang Dicadangkan (Ha)	PERIJINAN PEMANFAATAN HTR			Keterangan
			Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					

Tabel 35. Letak dan Luas Hutan Rakyat Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Luas Hutan Rakyat (Ha)	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

Tabel 36. Letak Dan Luas Areal Hutan Kemasyarakatan Tahun . . .

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Kegiatan Hutan Kemasyarakatan			Keterangan
		Penanaman (Ha)	Pelatihan Petugas Lapangan (orang)	Pelatihan Petani (orang)	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Tabel 37. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)	Jumlah KK Yang Terlibat (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
				Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Tabel 38. Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)	Jumlah Desa Lokasi Kegiatan PMDH (unit)	Jumlah KK Yang Terlibat (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 39. Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit)	Jumlah KK Yang Dilibatkan (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 40. Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit)	Jumlah KK Yang Dilibatkan (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

Tabel 41. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	2	3	4
1	S3		
2	S2		
3	S1		
4	SLTA		
5	SMP		
6	SD		
Jumlah			

Tabel 42. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Tahun	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

Tabel 43. Sarana dan Prasarana Instansi Kehutanan Pusat Dan Daerah Tahun . . .

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah (unit/buah)	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

44